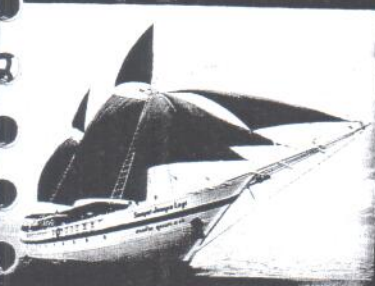




BADAN POM RI Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia
NA - DFC *The National Agency of Drug and Food Control*

PERJANJIAN KINERJA & RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017



BALAI BESAR POM DI MAKASSAR
JL. BAJI MINASA NO. 2, MAKASSAR - KODE POS (90126)

Lampiran 2. Format Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja BB/BPOM



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dr. Muhammad Guntur.

Jabatan : Kepala Balai Besar POM di Makassar

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Ir. Penny K. Lukito, M.C.P

Jabatan : Kepala Badan POM

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kepala Badan POM

Dr. Ir. Penny K. Lukito, M.C.P



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
BB/BPOM MAKASSAR

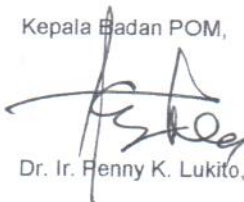
NO	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2017
1	Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan	Persentase Obat yang memenuhi syarat	95 %
		Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat	85 %
		Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	95 %
		Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	95 %
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	89 %
2	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat	Tingkat Kepuasan Masyarakat	80 %
		Jumlah Kabupaten/ Kota yang membenarkan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	4 Kab/Kota
3	Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan	Nilai SAKIP BB/POM dari Badan POM	B
Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan			
1	Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk Obat dan Makanan yang beredar	Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	4300 Sampel
		Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor publik (IFK)	100 %
2	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	14,67 %
3	Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	31,38 %
4	Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap pelanggaran Obat dan Makanan	Jumlah perkara di bidang Obat dan Makanan	14 Perkara
Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi Masyarakat			
1	Meningkatnya kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi	Jumlah layanan publik BB/BPOM	746 Layanan
		Jumlah komunitas yang diberdayakan	23 Komunitas
Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan			
1	Pengadaan sarana dan prasarana yang terkait pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar	84 %
2	Penyusunan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	10 Dokumen

Kegiatan

Anggaran :

1. Pengawasan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Makassar Rp.42.162.551.000,-

Kepala Badan POM,


Dr. Ir. Penny K. Lukito, M.C.P

Makassar, 06 JAN 2017

Kepala Balai Besar POM
di Makassar,

Dr. Muhammad Guntur



RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA

NO	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2017	TARGET (kumulatif)			REALISASI (kumulatif)			
				B3	B6	B9	B12	B3	B6	B9
1	Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan	Persentase Obat yang memenuhi syarat	95	95	95	95				
		Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat	85	85	85	85				
		Persentase Kosmetik yang memenuhi Syarat	95	95	95	95				
		Persentase Suplemen Makanan yang memenuhi syarat	95	95	95	95				
2	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat	Persentase Makanan yang memenuhi Syarat	89	89	89	89				
		Tingkat Kepuasan Masyarakat	80	80	80	80				
3	Meningkatnya kualitas kapasitas Kelembagaan	Jumlah Kabupaten/ Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	4	1	2	3				
		Nilai SAKIP BB/POM dari Badan POM	B	-	-	B				
Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan										
1	Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk Obat dan Makanan yang beredar	Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	4300	402	1937	3342	4300			
2	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor publik (IFK)	100	21.16	53.35	96.12	100			
		Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	14,67	3.69	7.01	11.98	14.67			
3	Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	31,38	7.08	16.71	26.01	31.38			
4	Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap pelanggaran Obat dan Makanan	Jumlah perkara di bidang Obat dan Makanan	14	3	7	11	14			

NO	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2017	TARGET (kumulatif)			REALISASI (kumulatif)		
				B3	B6	B9	B3	B6	B9
1	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat	Jumlah layanan publik BB/BPOM	746	186	362	561	746		
	informasi dan edukasi	Jumlah komunitas yang diberdayakan	23	8	17	20	23		
1	Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan	Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar	84	78,43	79,63	81,33	84,00		
2	Penyusunan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	10	4	5	7	10		

Makassar, 06 JAN 2017

Kepala Balai Besar POM
di Makassar,

